

ABSTRAK

Permasalahan tata Kelola lingkungan hidup menjadi urgensi utama dikarenakan akan berdampak pada keberlanjutan hidup manusia. Kolaborasi yang terjadi antar pemangku kepentingan perlu perhatian apakah kolaborasi sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya, sehingga dapat menekan permasalahan tata kelola lingkungan hidup yang terjadi. *Gampong* Rayek Kareung mengalami masalah serius terkait pengelolaan sampah, kondisi drainase yang tidak terawat dan topografi yang rendah menyebabkan *gampong* ini mengalami kekeringan yang mempengaruhi ketersediaan air bersih, genangan air dipermukaan tanah, dan resiko banjir yang dapat merusak infrastruktur dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses dan hambatan yang terjadi dalam kolaborasi pemerintah dengan lembaga non-pemerintah dalam tata kelola lingkungan hidup yang terjadi di *gampong* Rayeuk Kareung berbagai pihak yang terkait di Kota Lhokseumawe. Pendekatan Kualitatif deskriptif digunakan dengan mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data yang kemudian dilakukan pengelolaan data, data display, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan hasil kolaborasi lintas sektor berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, mengurangi genangan air, dan memenuhi kebutuhan air masyarakat melalui teknologi ramah lingkungan seperti lubang resapan biopori, dan sistem pemanenan air hujan. Keberlanjutan program didukung oleh kelembagaan lokal “Iserap,” yang memperkuat rasa kepemilikan masyarakat dan keberlanjutan inisiatif. Serta hambatan yang menunjukkan dari tiga aspek yaitu aspek budaya, institusi, dan politik. Rendahnya kesadaran kolektif, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas teknis, serta dinamika politik lokal menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Tata Kelola Lingkungan, Mitigasi Perubahan Iklim

ABSTRACT

Environmental governance issues have become a primary urgency due to their impact on the sustainability of human life. The collaboration among stakeholders requires attention to assess whether it is functioning effectively or not, in order to address the ongoing challenges in environmental governance. Gampong Rayeuk Kareung is facing serious issues related to waste management, poorly maintained drainage systems, and low topography, which have led to droughts affecting the availability of clean water, surface waterlogging, and flood risks that threaten infrastructure and public health.

This study aims to examine the processes and obstacles in the collaboration between government and non-governmental organizations in environmental governance in Gampong Rayeuk Kareung, involving various relevant parties in the city of Lhokseumawe. A descriptive qualitative approach was used, involving in-depth interviews, observations, and documentation as data collection methods, followed by data processing, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that cross-sectoral collaboration has successfully increased environmental awareness among the community, reduced surface waterlogging, and met water needs through environmentally friendly technologies such as biopore infiltration holes and rainwater harvesting systems. The sustainability of the program is supported by the local institution “Iserap,” which strengthens community ownership and the continuity of the initiatives. However, obstacles are identified in three key aspects: cultural, institutional, and political. Low collective awareness, lack of inter-agency coordination, limited technical capacity, and local political dynamics are the main factors hindering the effectiveness of the collaboration.

Key Word: Collaborative Governance, Environmental Governance, Climate Change Mitigation